

MANAJEMEN PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK DALAM MEWUJUDKAN KOMPETENSI GURU (STUDI KASUS DI BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA TENGAH)

Fauziatul Iffah¹, Kaniati Amalia²

¹ fauziatul.21057@mhs.unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Manajemen Pendidikan
Guru Penggerak
Kompetensi Guru

Riwayat artikel:

Diterima 20-06-2025
Direvisi 24-06-2025
Diterima 01-07-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen Program Guru Penggerak (PGP) dalam upaya mewujudkan kompetensi guru dengan studi kasus Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah. Kompetensi guru merupakan keterampilan yang harus dimiliki pendidik untuk memenuhi standar mutu. Hal ini menyoroti kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dapat diperoleh melalui pendidikan profesional. Fokus utama penelitian ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Responden penelitian terdiri dari para pengelola atau Tim Kerja dari PGP di BBGP Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen PGP di BBGP Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dalam perencanaan, BBGP menyusun program secara sistematis berdasarkan kebutuhan lapangan dan kebijakan pusat, termasuk pengembangan kurikulum, teknis pelaksanaan, serta penjadwalan pelatihan. Pada tahap pengorganisasian, struktur kerja ditata dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengelola, penanggung jawab wilayah serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung koordinasi. Dalam tahap pelaksanaan, program dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran daring, lokakarya luring, pendampingan individu, dan kegiatan komunitas praktik. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Penulis yang sesuai:

Fauziatul Iffah

fauziatul.21057@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kompetensi guru merupakan keterampilan yang harus dimiliki pendidik untuk memenuhi standar mutu. Hal ini menyoroti kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dapat diperoleh melalui pendidikan profesional (Rahman, 2022). Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maka pendidik harus memiliki salah satu dari kompetensi yang efektif dan berkelanjutan meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pelatihan profesional, diklat maupun pengalaman mengajar.

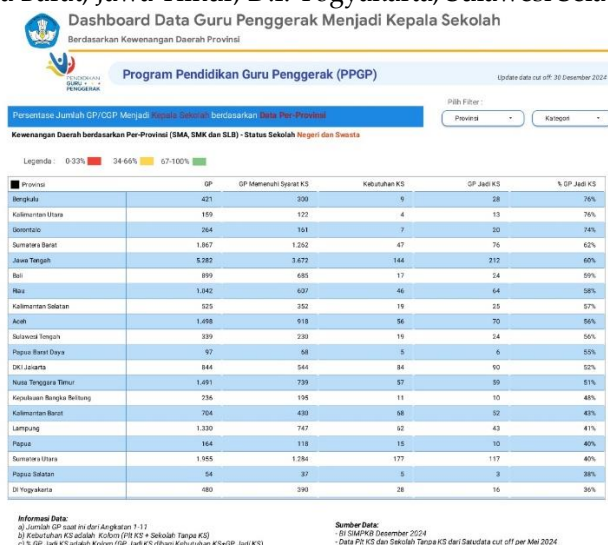
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, baik dari perbagian maupun keseluruhan dengan besar pengaruh sebesar 67,30%. Ringkasnya, kinerja guru sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru pada keempat aspek tersebut (Rohman, 2020). Kemudian berdasarkan hasil penelitian (Damanik, 2019) menunjukkan bahwa kinerja guru dan kompetensinya berkorelasi signifikan, dengan ambang signifikansi alpha sebesar 0,05 maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,603. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kompetensi guru dalam meningkatkan efektivitas guru. Terbukti dari sejumlah penelitian bahwa kinerja guru dipengaruhi secara signifikan oleh komeptensi.

Mengingat pentingnya kompetensi guru terhadap kinerja guru serta peningkatan pendidikan Nasional, maka pemerintah telah mengembangkan program untuk mendorong peningkatan kompetensi guru melalui kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu program tersebut adalah program Pendidikan Guru Penggerak yang diperkenalkan pada tahun 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mahlil & Bangun, 2022). Menurut peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia No 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak, yang menjadi tujuan pendidikan guru penggerak adalah terciptanya profil Guru Penggerak, yaitu guru yang mampu mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkesinambungan serta merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa (Direktur Jenderal Guru dan Tegana Kependidikan, 2023).

Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) diperkenalkan sebagai upaya strategis untuk melatih para pendidik dengan keterampilan kepemimpinan pendidikan yang diperlukan untuk memimpin perubahan dalam komunitas pendidikan dan sekolah. Guru penggerak seharusnya berubah menjadi agen perubahan yang mendorong lingkungan inklusif, pendidikan yang berpusat pada siswa, dan dengan berkontribusi pada pengembangan sekolah yang efektif. Melalui Program Pendidikan Guru Penggerak diharap mampu untuk mewujudkan kompetensi guru sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran dalam program ini, yang awalnya di mana pendidikan difokuskan pada instruktur, sekarang berubah menjadi fokus pada siswa, dan pembelajaran secara alami lebih terstruktur dan terfokus (Rohmad, 2024).

Penyelenggaran Program Pendidikan Guru Penggerak Rekognisi telah ditetapkan 10 BBGP/BGP, Balai Besar Guru Penggerak semula didirikan pada tahun 1978 dengan nama Pusat pengembangan dan Penataran Guru (PPPG), kemudian berubah nama pada tahun 2007 menjadi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan dan Kependidikan (PPPPTK), kemudian pada tahun 2009, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) didirikan di Karanganyar. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi kedua kategori organisasi tersebut. Pada tahun 2019, bersamaan dengan berdirinya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, LPPPTK KPTK dan enam PPPPTK pun ditempatkan di bawah direktorat tersebut. Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS) merupakan nama lain dari LPPKS.

telah didirikan 27 Balai Guru Pengusaha (BGP) yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan lain-lain.



Gambar 1.2 Data Presentase GP/CGP Per-Propinsi
Sumber : Dashboard Pengangkatan GP KS

Berdasarkan data presentase Program Guru Penggerak per-propinsi tahun 2024 di atas, menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki presentase jumlah Guru Penggerak dan Calon Guru Penggerak yang tertinggi yakni Guru Penggerak angkatan 1-9 dengan jumlah 3.693 serta Calon Guru Penggerak angkatan 10 dan 11 dengan jumlah 1.603. Kemudian Jawa Tengah telah mengangkat sebanyak 212 Kepala Sekolah dari Guru Penggerak dan Calon Guru Penggerak dengan presentase 60%. hal tersebut membuktikan bahwa Program Pendidikan Guru Penggerak di Jawa Tengah telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam peningkatan kompetensi guru di Jawa Tengah.

Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah merupakan tempat dan pimpinan pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak wilayah Jawa Tengah. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak Dan Balai Guru Penggerak menyebutkan bahwa Balai Besar Guru Penggerak berfungsi sebagai unit pelaksanaan teknis dalam bidang pembinaan serta dan memberdayakan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas sekolah, calon pengawas sekolah. Balai Besar Guru Penggerak juga berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para peserta Program Guru Penggerak. Proses monitoring dilakukan untuk menjamin setiap peserta mengikuti pelatihan dengan baik dan memperoleh kompetensi yang diharapkan. Secara berkala, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui efektivitas program dan menentukan bidang-bidang yang perlu dikembangkan. Dengan demikian, Balai Besar Guru Penggerak memiliki tugas ganda, yaitu memastikan kualitas pelatihan serta mendukung para guru untuk mengimplementasikan hasil pelatihan di lapangan. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, BBGP Provinsi Jawa Tengah menyusun dan melaksanakan pengelolaan atau manajemen untuk mengembangkan kompetensi guru. (Chusni et al., 2023).

Manajemen menurut Haiman dalam (Lumingkewas, 2019) merupakan proses mengelola aktivitas individu lain dan memantau upaya seseorang dalam usaha tujuan bersama. Sedangkan menurut S. P. Siagian Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan menggunakan sumber daya manusia serta sumber daya tambahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan manajemen adalah kemampuan atau kecakapan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Manajemen", George R. Terry kemudian menguraikan empat fungsi mendasar manajemen yaitu Planning

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) and Controlling (Pengawasan).

Berdasarkan studi pendahuluan dilapangan yaitu di Balai Besar Guru Penggerak dengan melakukan wawancara, dihasilkan bahwa di Balai Besar Guru Penggerak dalam menjalankan program guru penggerak, terdapat kelompok kerja yang bertugas untuk mengimplementasikan program guru penggerak, yakni kelompok kerja pendidikan guru penggerak atau Pokja PGP. Kelompok kerja ini bertugas untuk mengelola program guru penggerak dengan efektif dan efisien. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang optimal, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk dinas pendidikan, sekolah, dan komunitas pendidikan lainnya. Kemudian pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur kelompok kerja yang jelas, membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota, serta memastikan adanya komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Lalu terdapat juga pelaksanaan program yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan terencana seperti pelatihan, pendampingan, dan evaluasi terhadap guru-guru peserta program, di mana setiap tahapan diawasi secara berkala agar berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan dan efektivitas program, baik melalui evaluasi internal oleh Pokja PGP maupun eksternal dengan melibatkan pihak-pihak terkait, guna mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi dan inovasi untuk peningkatan program ke depannya. Dengan adanya manajemen yang tepat, Balai Besar Guru Penggerak dapat terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada program ini agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal (Syahputra & Aslami, 2023).

Berdasarkan dari data dan juga penelitian yang telah banyak dilakukan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “Manajemen Program Pendidikan Guru Penggerak dalam mewujudkan kompetensi guru” lebih tepatnya di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Karena penelitian tersebut memiliki keunikan pada fokus strategi pengelolaan program pendidikan guru penggerak yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas kompetensi guru sebagai agen perubahan di dunia pendidikan. Kemenarikan penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam terhadap pendekatan manajerial yang diterapkan oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai salah satu pusat pembelajaran dan pengembangan guru di Indonesia. Urgensi penelitian ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan guru yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berdampak pada kemajuan pendidikan nasional, sejalan dengan transformasi kurikulum dan tuntutan abad ke-21. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan manajemen yang lebih baik untuk keberhasilan Program Pendidikan Guru di masa mendatang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan study kasus dan lokasi penelitian berada di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan pada bulan September 2024 sampai Januari 2025. Untuk sumber data peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan untuk teknik analisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang berhubungan langsung dengan penelitian mengenai Program Guru Penggerak antara lain Sekretaris Tim PGP, Koordinator Admin SIM, Penanggung Jawab Pelaporan PGP, Penanggung Jawab Wilayah 1, Penanggung Jawab Wilayah 2. Peneliti juga mendapatkan data dari observasi dan studi dokumentasi untuk penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu berupa : Kondensasi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Sedangkan untuk uji keabsahan data, penelitian ini menggunakan Uji

Transferabilitas, Depentabilitas, Konfirmabilitas dan Kredibilitas, kemudian untuk uji Kredibilitas peneliti menggunakan Member Check, Ketekunan Pengamatan dan Trianggulasi.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Berdasarkan dari uraian diatas pentingnya program pendidikan guru penggerak dalam mewujudkan kompetensi guru, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Program Guru Penggerak dirancang, dikelola, dijalankan, dan diawasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi guru. Untuk manajemen dalam program pendidikan guru penggerak mempunyai sistem manajemen sebagai berikut :

2.1 *Perencanaan Program Pendidikan Guru Penggerak Dalam Mewujudkan Kompetensi Guru Di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah*

Perencanaan dalam Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) mencerminkan konsep yang dikemukakan oleh Terry (2014), yaitu proses pengambilan keputusan yang strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam PGP, perencanaan dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek koordinasi lintas pihak, kesiapan sumber daya manusia, perencanaan substansi dan teknis pelaksanaan, pengelolaan anggaran, serta perencanaan monitoring dan evaluasi (Monev) yang matang. Kemampuan koordinasi dan mengantisipasi kebutuhan serta tantangan di masa depan memungkinkan pelaksana PGP untuk menciptakan pola perilaku yang mendukung peningkatan kompetensi guru secara efektif dan berkelanjutan.

Perencanaan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dalam mewujudkan kompetensi guru diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui analisis terhadap kompetensi guru di lapangan, sehingga pelatihan dapat disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum dan modul pelatihan dilakukan berdasarkan kebutuhan pendidikan di Indonesia, mencakup aspek pedagogik dan teknologi pendidikan agar relevan dengan kondisi nyata. Penjadwalan yang sistematis juga menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program (Kebudayaan, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, termasuk koordinasi lintas pihak, kesiapan sumber daya manusia, perencanaan substansi dan teknis pelaksanaan, pengelolaan anggaran, serta perencanaan monitoring dan evaluasi (Monev), berperan penting dalam keberhasilan PGP dalam meningkatkan kompetensi guru.

Dalam Kepdirjen GTK tentang Juknis PGP, transparansi menjadi prinsip utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program agar seluruh pemangku kepentingan, seperti calon guru penggerak (CGP), pendamping (PP), fasilitator, serta dinas pendidikan, dapat mengetahui dan memahami setiap tahap yang dilakukan. Transparansi ini diwujudkan melalui pengelolaan data yang akurat, penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) yang terdigitalisasi, serta perencanaan lokakarya yang terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Dengan keterbukaan informasi mengenai jadwal, instruktur, serta mekanisme seleksi dan kelulusan, PGP dapat berjalan secara akuntabel dan kredibel, sehingga memastikan bahwa tujuan utama dalam meningkatkan kompetensi guru dapat tercapai secara efektif.

Melalui perencanaan yang matang, Program Pendidikan Guru Penggerak di BBGP Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan sistem koordinasi lintas pihak, kesiapan sumber daya manusia, perencanaan substansi dan teknis pelaksanaan, pengelolaan anggaran, serta perencanaan monitoring dan evaluasi (Monev) yang akurat, serta pelaksanaan lokakarya yang efektif, program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru secara signifikan. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada implementasinya, tetapi juga pada tahap awal perencanaan yang menentukan arah dan keberlanjutan program.

2.2 Bentuk Pengorganisasian Program Pendidikan Guru Penggerak Dalam Mewujudkan Kompetensi Guru Di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah

Pengorganisasian Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk struktur yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara, proses ini diawali dengan pembentukan tim kerja yang terbentuk seperti tim kerja fungsional yang bersifat dinamis dan memungkinkan penyesuaian peran dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan program. Meskipun demikian pembagian tugas dan tanggung jawab telah diatur secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) kepala BBGP Jawa Tengah, yang menjadi landasan legal dan operasional Tim kerja PGP.

Pengorganisasian dalam Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Jawa Tengah dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas agar program berjalan efektif dan efisien. Dalam PGP, pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas mulai dari Kepala Tim kerja PGP, Sekretaris PGP berperan dalam mengelola administrasi umum, koordinator admin LMS PGP menangani kendala teknis di Learning Management System (LMS), Koordinator SIMPKB PGP, Penanggungjawab data PGP, serta PIC (Person in Charge) sebagai penanggung jawab wilayah. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut telah disusun rinci dalam tabel excel pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Kerja PGP. Dengan adanya pembagian tersebut memungkinkan setiap anggota tim untuk memahami tugas, dan tujuan dengan jelas serta sekaligus dapat meningkatkan efisiensi kerja yang baik untuk program ini dapat berjalan secara optimal dalam meningkatkan kompetensi guru.

Pengorganisasian dalam Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) sejalan dengan konsep Terry dalam (Afrahul Fadhila Daulay, 2016) yang menekankan pentingnya ikatan dan kolaborasi antar individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tim kerja PGP terdapat koordinasi lintas tim yang dilakukan secara reguler, baik dalam bentuk rapat harian, mingguan, maupun koordinasi langsung dengan dinas atau cabang dinas wilayah masing-masing. Ini memperlihatkan bahwa meskipun tidak ada stuktur tim yang formal, namun komunikasi dan sinergi antar tim tetap terjaga dengan baik. Selain itu peran PIC Wilayah untuk setiap daerah memperkuat sistem desentralisasi tanggung jawab, sehingga pelaksanaan program di tiap wilayah atau daerah tetap terkontrol dan tetap sesuai dengan kebijakan atau ketetapan pemerintah pusat.

Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, dan pihak sekolah, menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program (Nastuti, 2024). Tim penanggung jawab wilayah memiliki tugas utama dalam memastikan data peserta, berkoordinasi dengan dinas terkait, serta menangani kendala yang muncul selama pelaksanaan PGP. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, sistem pendukung yang kuat, dan koordinasi yang baik, program ini diharapkan dapat berjalan secara optimal dalam mewujudkan peningkatan kompetensi guru di Jawa Tengah.

2.3 Bentuk Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak Dalam Mewujudkan Kompetensi Guru Di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara sistematis melalui berbagai tahapan. Proses ini mencakup pengelolaan kelas daring dan luring, monitoring kehadiran peserta, serta evaluasi tugas yang diberikan kepada Calon Guru Penggerak (CGP). Dalam pelaksanaannya, terdapat batas toleransi ketidakhadiran yang ketat, yaitu maksimal empat kali baik dalam sesi daring maupun luring, tanpa memandang alasan ketidakhadiran. Jika CGP tidak memenuhi kewajiban tersebut, mereka berisiko gugur dari program. Selain itu, fasilitator dan Pengajar Praktik (PP) bertanggung jawab dalam memberikan penilaian dan memastikan bahwa CGP menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan.

Selain sistem pembelajaran, pelaksanaan PGP juga melibatkan berbagai kegiatan pendukung seperti lokakarya, praktik pembelajaran di sekolah, serta pendampingan individu oleh instruktur dan fasilitator. Setiap tahapan kegiatan dilengkapi dengan administrasi yang tertib, termasuk laporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh instruktur, fasilitator, dan PP. Koordinasi dengan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kelancaran program. Dengan mekanisme yang terstruktur ini, pelaksanaan PGP diharapkan dapat menghasilkan guru yang memiliki kompetensi tinggi serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan pendidikan masing-masing.

Pelaksanaan dalam manajemen berperan penting dalam memastikan bahwa semua elemen organisasi bergerak secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, fungsi penggerakan ini diwujudkan melalui kepemimpinan fasilitator, instruktur, dan Pengajar Praktik (PP) dalam membimbing serta memotivasi peserta. Dengan adanya pengelolaan kelas daring, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, serta sistem pendampingan yang terstruktur, program ini dapat berjalan secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Niswah & Setiawan (2021) bahwa fungsi pelaksana dalam manajemen bertujuan untuk memastikan organisasi beroperasi sesuai visi dan misinya melalui tindakan yang konkret.

Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) merupakan tahap implementasi dari rencana yang telah disusun, di mana berbagai strategi diterapkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Proses ini mencakup pelatihan daring dan luring agar peserta dapat mengakses materi secara fleksibel, pendampingan intensif untuk memastikan pemahaman dan penerapan materi dalam praktik mengajar, serta evaluasi berkala guna menilai efektivitas program. Keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada partisipasi aktif peserta serta peran fasilitator dalam membimbing mereka, sebagaimana dinyatakan oleh Kemendikbudristek (2022) bahwa keterlibatan aktif dan dukungan yang kuat menjadi kunci efektivitas pelaksanaan program.

Selain mekanisme pelaksanaan yang sistematis, penulismelakukan tudi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti modul pelatihan, jadwal kegiatan, daftar hadir peserta, laporan fasilitator dan PP, serta hasil evaluasi tugas yang diberikan kepada CGP. Data dari dokumentasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program secara administratif serta membantu memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai pedoman.

Adapun observasi langsung dilakukan selama sesi pelatihan daring maupun luring, serta saat praktik pembelajaran di sekolah. Observasi ini bertujuan untuk menilai keterlibatan peserta, kualitas interaksi antara CGP dan fasilitator, serta implementasi materi dalam pembelajaran. Pendekatan observasi dan dokumentasi ini mendukung validitas temuan dan memungkinkan evaluasi program secara lebih menyeluruh. Penelitian oleh Wulandari et al. (2023) menunjukkan bahwa kombinasi metode dokumentasi dan observasi mampu mengungkap secara mendalam dinamika pelaksanaan PGP serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dengan pelaksanaan yang sistematis melalui pelatihan daring dan luring, pendampingan intensif, serta evaluasi berkala, Program Pendidikan Guru Penggerak di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan secara efektif. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif peserta, dukungan fasilitator, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat meningkatkan kompetensi guru secara optimal dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

2.4 Pengawasan Program Pendidikan Guru Penggerak Dalam Mewujudkan Kompetensi Guru Di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah

Pengawasan dalam Program Pendidikan Guru Penggerak di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala. Proses ini mencakup penyusunan instrumen Monev yang terstruktur dan mendigitalisasi data untuk memastikan akurasi serta efisiensi dalam pengumpulan informasi. PIC atau penanggung jawab wilayah bertugas untuk memastikan bahwa setiap tahap program, mulai dari pelatihan hingga pendampingan, berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan hasil evaluasi dikompilasi secara berkala guna menilai efektivitas program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan.

Selain monitoring internal, pengawasan juga melibatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan dan lembaga terkait untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Umpan balik dari peserta dan fasilitator menjadi bagian penting dalam proses evaluasi, yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat, Program Pendidikan Guru Penggerak dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif dalam peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Pengawasan Program Pendidikan Guru Penggerak di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa mekanisme yang terstruktur. PIC atau penanggung jawab wilayah memastikan fasilitator dan Pengajar Praktik (PP) melakukan penilaian di LMS serta memperbarui progres penilaian secara berkala. Kemudian PIC atau penanggung jawab wilayah juga bertanggung jawab mengolah hasil evaluasi dan menyusun laporan untuk perbaikan program. Selain itu, pengawasan terhadap lokakarya mencakup penyusunan laporan pertanggungjawaban, termasuk dokumen administratif seperti SK, ST, DH, FBK, serta dokumentasi kegiatan. Sementara itu, penanggung jawab (Penjab) di tiap wilayah bertugas memberikan solusi atas kendala yang muncul selama pelaksanaan program, sehingga memastikan kelancaran dan efektivitas Pendidikan Guru Penggerak.

Pengawasan dalam Program Pendidikan Guru Penggerak bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup monitoring berkelanjutan terhadap kegiatan pelatihan serta perkembangan peserta, evaluasi hasil melalui asesmen kompetensi untuk mengukur peningkatan kemampuan guru, dan pemberian umpan balik yang konstruktif guna memperbaiki aspek yang masih kurang. Dengan pengawasan yang efektif, masalah dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga memungkinkan penyesuaian yang diperlukan demi meningkatkan kualitas program secara keseluruhan (Alfatiah, 2022).

Pengawasan dalam suatu program, sebagaimana dikemukakan oleh Admosudirjo, merupakan proses membandingkan, mengoreksi, dan mengawasi pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Dalam konteks Program Pendidikan Guru Penggerak, pengawasan dilakukan dengan membandingkan rencana awal dengan pelaksanaannya, mengidentifikasi kendala, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan proses pengawasan yang baik, efektivitas program dapat terus ditingkatkan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang diharapkan.

Dengan adanya sistem pengawasan yang terstruktur, Program Pendidikan Guru Penggerak di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring, evaluasi, serta umpan balik yang berkelanjutan memastikan bahwa setiap tahapan program dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pengawasan yang baik akan meningkatkan kualitas program serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru..

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Program Pendidikan Guru Penggerak di Balai Besar Guru Penggerak dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek koordinasi lintas pihak, kesiapan infrastruktur dan fasilitas, pemetaan kebutuhan lapangan, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan jadwal pelatihan dan teknis pelaksanaan, pengelolaan anggaran, serta perencanaan monitoring dan evaluasi. Perencanaan yang matang ini menjadi fondasi penting dalam menjamin keberhasilan program untuk mewujudkan kompetensi Guru Penggerak yang profesional, inovatif, dan mampu membawa perubahan positif di dunia pendidikan.
- 2) Pengorganisasian Program Pendidikan Guru Penggerak di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengadopsi pendekatan berbasis kerja tim yang lebih fleksibel. Pembentukan tim kerja dilakukan berdasarkan tugas dan tupoksi program, dengan setiap tim memiliki koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas. Meski demikian, setiap tugas dan peran diatur secara jelas dalam Surat Keputusan (SK) yang dapat diperbarui jika terjadi perubahan. Kolaborasi lintas tim dan koordinasi yang teratur memastikan kelancaran implementasi program.
- 3) Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara sistematis melalui berbagai tahapan. Proses ini mencakup pengelolaan kelas daring dan luring, monitoring kehadiran peserta, serta evaluasi tugas yang diberikan kepada Calon Guru Penggerak (CGP). Selain sistem pembelajaran, pelaksanaan PGP juga melibatkan berbagai kegiatan pendukung seperti lokakarya, praktik pembelajaran di sekolah, serta pendampingan oleh instruktur dan fasilitator. Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) merupakan tahap implementasi dari rencana yang telah disusun, di mana berbagai strategi diterapkan untuk meningkatkan kompetensi guru.
- 4) Pengawasan dalam Program Pendidikan Guru Penggerak di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala. Selain monitoring internal, pengawasan juga melibatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan dan lembaga terkait untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Pengawasan dalam Program Pendidikan Guru Penggerak bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan..

REFERENSI

- Afrahul Fadhila Daulay. (2016). Dasar-dasar manajemen organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 6(2), 34–48.
- Alfatiah. (2022). Manajemen Program Guru Penggerak Sebagai Peningkatan Profesionalisme Guru Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Pengelolaan Pendidikan*.
- Chusni, A., Afifah, D., & Syirojuddin, M. A. (2023). Peran Balai Besar Guru Penggerak Merangsang Upaya dan Kualitas Guru Penggerak untuk Kemajuan Pendidikan di Indonesia. 17(1), 19–29.
- Damanik, R. (2019). Hubungan Kompetensi Guru Dengan Kinerja Guru. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.37755/jsap.v8i2.170>
- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2023). Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor

- 2626/B/HK.04.01/2023 Tentang Model Kompetensi Guru. In Peraturan Pemerintah.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2020). Panduan Guru Penggerak. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id>
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan Program Guru Penggerak untuk Asesor. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Reset, Dan Teknologi. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- Luminkewas, E. M. C. (2019). Konsep Dasar Manajemen (Ilmu dan Seni Mengatur Organisasi). Konsep Dasar Manajemen: Ilmu Dan Seni Mengatur Organisasi, 1–75.
- Mahlil, H., & Bangun, M. (2022). Analisis Program Guru Penggerak Sebagai Agen Transformasi Dalam Sistem Pendidikan di Kota Subulussalam Provinsi Aceh.
- Nastuti, S. (2024). Penerapan manajemen guru penggerak dalam meningkatkan. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1133–1146.
- Niswah, U., & Setiawan, M. R. (2021). Implementasi Fungsi Actuating Dalam Pembinaan Santri di Pondok Pesantren. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1), 115–132. <https://doi.org/10.15408/jmd.v1i1.24037>
- Rahman, A. (2022). Analisis Pentingnya Pengembangan Kompetensi Guru. 6, 8455–8466.
- Rohmad, A. N. (2024). Manajemen Strategi Program Guru Penggerak (PGP) Sebagai Agen Transformasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Tengah.
- Rohman, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal MADINASIKA Manajemen Dan Kelas*, 1(2), 92–102. <https://ejurnalunma.ac.id/index.php/madinasika>
- Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–56.